1.9 Analisis Hasil

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif, Kualitatif yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan narasumber informasi tersebut kemudian dievaluasi agar menghasilkan data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan, dan diberikan dalam bentuk rangkaian kata atau frase. Penelitian yang dianggap deskriptif adalah penelitian yang berusaha melukiskan gambaran atau membuat potret suatu masalah dari segi pola dan persoalannya. Peneliti memanfaatkan informasi yang telah diperoleh melalui temuan penelitian yang dilakukan di lapangan, termasuk wawancara dengan anggota kepolisian dan analisis literatur yang diterbitkan. Tidak hanya hasil wawancara, tetapi juga hasil wawancara yang penulis kaitkan dengan referensi dari literatur dan preseden hukum. Agar temuan tersebut dapat menjadi peta menuju penyelesaian masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu upaya peneliti dalam mencari perbandingan serta menemukan motivasi yang baru untuk penelitiannya selanjutnya. Bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu berkaitan pada penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dan topik penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya badan kajian pada penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang telah mendasari pemikiran penulisan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yohana Florensisa Dian (2022) yang berjudul “Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung” Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategis sebagai dasar kerangka teori penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi penyalahgunaan narkoba di Temanggung sebagian besar kasus merupakan dari kelompok pelajar.

Penyalahgunaan narkoba juga masih pada skala kecil yaitu penggunaan obat terlarang yang diperjual belikan secara ilegal. BNNK Temanggung menjalankan berbagai program pencegahan sebagai bentuk implementasi dari strategi pencegahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa strategi pencegahan pada kalangan pelajar di Kabupaten Temanggung yang dijalankan oleh BNNK Temanggung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan strategi ini belum mampu memberikan hasil signifikan yang dapat menyelesaikan permasalahan tingginya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.⁷

Kedua, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurlaelah (2018) yang berjudul “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja)” metode penelitian menggunakan metode kualitatif hasil penelitian strategi pencegahan yang dilakukan badan narkotika nasional dalam melaksanakan program pemberantasan mendapat tantangan berat, meskipun dalam proses pemberantasan telah dilakukan upaya optimal dalam menggali informasi mengenai peredaran narkoba namun hal ini masih sangat sulit untuk mencegah peredaran narkoba karena tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahguna narkoba dari tahun ketahun sehingga pihak BNN maupun kepolisian sulit untuk mengatasi ketersediaan dan peredaran narkoba di masyarakat.⁸

⁷ Yohana Florensisa Dian (2022) “Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung”.

⁸ Nurlaelah (2018) “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja)”.

Ketiga, dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Dwi Aprodita Putri (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja”, menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan yaitu: Pelaksanaan kegiatan pencegahan melalui media tatap muka dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba/narkotika di lingkungan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pencegahan melalui media tatap muka dengan mengadakan Seminar, workshop, diskusi, forum komunikasi pertemuan dan gathtering di lingkungan pendidikan.

Pelaksanaan kegiatan pencegahan melalui media luar ruang dalam bentuk pemasangan umbul- umbul, standing banner, pembuatan poster dan spanduk di lingkungan sekolah dan kampus. Pelaksanaan kegiatan pencegahan melalui media penyiaran/elektronik dalam bentuk dialog interaktif, kuis dan iklan P4GN di stasiun televisi lokal dan radio lokal. Pelaksanaan kegiatan pencegahan memalui media cetak kelembagaan dalam bentuk penulisan artikel, pariwisata dan berita mengenai P4GN di media cetak lokal yang ada di Sumatera Barat. line/ sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain.⁹

⁹ Dwi Aprodita Putri (2016) “Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja”

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari dalam hukum pidana yang berasal dari kata Belanda yaitu strafbaarfeit. Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit diartikan sebagai delik yang lazimnya mengandung arti peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana. Selain itu secara umum hukum pidana juga memiliki arti yaitu aturan-aturan yang berlaku dan diberlakukan dalam lingkungan masyarakat agar mengatur segala jenis tindakan yang tidak sesuai dengan hukum baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang berlaku dan diancam dengan hukuman atau sanksi oleh negara. Perbuatan tersebut dianggap merugikan masyarakat, negara, atau individu, dan karena itu, perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana dapat berupa perbuatan aktif (misalnya, pencurian) maupun perbuatan pasif (misalnya, kelalaian yang menyebabkan kerugian).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, **tindak pidana** diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang khusus yang mengatur kejahatan tertentu, seperti undang-undang narkoba, undang-undang perlindungan anak, dan sebagainya. Tindak pidana dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan, termasuk pidana umum, pidana khusus, hingga pelanggaran administratif.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana yang dikenal sebagai *strafbaar feit*. Istilah *strafbaarfeit* sendiri terdiri dari dua suku kata yakni “*strafbaar*” dan “*feit*”. Perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda yakni “*een gedeelte van de werkelijkheid*” atau dapat diartikan diartikan “sebagian dari suatu kenyataan”. Sementara kata “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Dengan demikian secara harafiah istilah “*strafbaar feit*” itu dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁰

Hukum pidana di negara Belanda menggunakan istilah “*strafbaar feit*”, seringkali juga menggunakan istilah “*delict*” yang dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan “*delictum*”. Sedangkan negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon menggunakan istilah “*offense*” atau “*criminal act*”. Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka berdasarkan asas konkordansi istilahnya pun sama dengan yang digunakan di negara Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹¹

Di Indonesia sendiri istilah *strafbaar feit* dikenal juga dengan beberapa istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang

¹⁰ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

¹¹ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94.

diantaranya peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹²

Selain itu, menurut beberapa ahli hukum dalam menerjemahkan *strafbaar feit* juga bervariasi seperti yang disebut oleh Roeslan Saleh dan Moeljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”, *Utrecht* menggunakan istilah “peristiwa pidana”, sedangkan Andi Zainal Abidin menggunakan istilah umum yang digunakan oleh para sarjana yaitu “delik”.¹³

Mengenai definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana dapat dilihat pada beberapa pendapat para pakar hukum seperti yang dijelaskan oleh Simons dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* yakni, “sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.¹⁴

Sementara menurut Pompe, istilah *strafbaar feit* dapat dirumuskan yaitu:¹⁵

Sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

¹² Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

¹³ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 98.

Lebih lanjut menurut Van Hamel,¹⁶ merumuskan delik atau *strafbaar feit* yakni:

Eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).

Selanjutnya dikemukakan pula oleh Vos mengenai definisi strafbaar feit secara singkat yaitu, “sebagai suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.”¹⁷

Sehingga dengan demikian dapat ditarik pengertian sederhana dari strafbaar feit atau tindak pidana berdasarkan pendapat para pakar hukum yakni suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang secara hukum, dimana larangan disertai dengan sanksi hukum terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut.

Menurut Van Bemmelen, untuk dapat dipidananya seorang pembuat perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku atau pelaku mampu bertanggungjawab.¹⁸

Mengenai pengertian tindak pidana, ada banyak pengertian dari beberapa sarjana yang menjelaskan tentang tindak pidana menurut persepsi masing-masing.

¹⁶ Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 89.

¹⁷ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.161.

¹⁸ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Kencana. hlm.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid kata “delik” dari Bahasa latin yaitu “delictum” atau “delicte” yang dalam Bahasa belanda dengan isitilah “strafbaar feit”. Kata strafbaar feit oleh para pengarang di Indonesia digunakan sesuai dengan sudut pandangnya masing- masing.¹⁹

Menurut Adami Chazawi kata “delik” sebenarnya tidak berhubungan dengan kata “strafbaar feit”. Kata “delik” berasal dari bahasa latin yaitu “delictum”, namun dalam sisi pengertiannya tidak ada perbedaan mengenai pengertiannya.

Hukum tindak pidana melindungi kepentingan-kepentingan hukum misalnya nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan, namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru menyakiti kepentingan hukum si pelanggar. Perlu di ingat pula, bahwa sebagai alat social control, fungsi hukum pidana adalah subsidair artinya hukum pidana hendaknya baru diadaka/dipergunakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.²⁰

Oleh karena itu pengertian tindak pidana perlu dipahami mengingat ketentuan hukum pidana tidak harus diartikan dengan semua pelanggaran yang akibatnya penjatuhan hukuman pidana. Pidana merupakan moral bangsa agar dapat melihat apa yang baik dan tidak baik menurut pandangan suatu bangsa.

¹⁹ Andi Zainal Farid. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. hlm 145.

²⁰ Mohammad Eka Putra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU Press. hlm. 13.

2.3 Pembagian Hukum Pidana

Meninjau hukum pidana sebagai objek studi, hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

- a. Hukum pidana materiil atau biasa disebut hukum pidana substansif yaitu hukum yang diajukan kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana dan harus bertentangan dengan undang-undang. Hukum pidana materiil dikelompokkan kedalam peraturan pembuatan yang diancam dengan hukuman, peraturan terhadap pertanggung jawaban terhadap hukum pidana. Acuan yang digunakan hukum materiil bersifat pasti dilihat dan dipertimbangkan dari undang-undang yang berlaku serta digunakan sesuai domisili hukum tempat terdakwa dan korban berada.
- b. Hukum pidana formil Hukum pidana formil merupakan hukum acara pidana atau suatu proses atau prosedur untuk melakukan segala tindakan manakala hukum pidana materiil akan, sedang, dan/atau sudah dilanggar atau dengan perkataan lain, Hukum pidana formil merupakan hukum acara pidana atau suatu proses atau prosedur untuk melakukan segala tindakan manakala ada sangkaan akan, seilang, dan atau sudah terjadi tindak pidana. Sumber hukum formil juga menentukan sebab dan bentuk terjadinya suatu kaidah atau peraturan hukum.²¹

²¹ Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Airlangga University Press (AUP). hlm. 1

2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebagaimana dalam hukum pidana, setiap tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu, rumusan tersebut akan merinci pada setiap unsur ataupun komponen-komponen yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tindak pidana merupakan indikator yang wajib dipenuhi dalam menentukan suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana atau bukan. Jika perbuatan seseorang telah memenuhi setiap unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan, maka orang tersebut secara hukum dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Begitupun sebaliknya, apabila unsur-unsur pidana tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak dapat dipidana atau dijatuhi sanksi pidana.

Unsur-unsur tindak pidana setidaknya dapat dibedakan dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang, dari sudut pandang teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang undang-undang yaitu bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²²

Dalam unsur-unsur tindak pidana dikenal adanya dua doktrin atau aliran yakni aliran monisme dan aliran dualisme. Kedua aliran ini terdapat beberapa perbedaan pandangan yang mendasar. Pada aliran monisme tidak

²² Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

memisahkan antara suatu tindak pidana dengan kesalahan, artinya kesalahan merupakan unsur tindak pidana, selain itu kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Jadi terbuktinya tindak pidana yang didalamnya telah terpenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana, maka pelaku tindak pidana bertanggungjawab atas tindakannya.²³

Beberapa ahli hukum penganut aliran monisme ini diantaranya Jonkers dan Schravendijk.²⁴

Unsur-unsur tindak pidana menurut Jonkers meliputi:²⁵

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Schravendijk meliputi:²⁶

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Jika aliran monisme tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan, maka berbeda hal dengan aliran dualistis yang secara prinsip memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.²⁷ Aliran dualisme dalam penerapan hukum oleh

²³ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, hlm. 15.

²⁴ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 81.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid

²⁷ Agus Rusianto, Loc.Cit.

hakim patut terlebih dahulu membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa benar merupakan suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan aturan hukum dan apabila terbukti benar maka hakim selanjutnya kembali membuktikan apakah pada saat melakukan perbuatan terdakwa terbukti bersalah sehingga patut dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Sebaliknya apabila atas perbuatan terdakwa tidak terbukti maka hakim tidak perlu lagi membuktikan kesalahan terdakwa. Sehingga dalam hal pembuktian hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*”, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti atau *beyond reasonable doubt*.²⁸

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, sebagaimana yang dikutip oleh Adami Chazawi meliputi:²⁹

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sementara itu menurut pendapat Vos yang masih dikutip oleh Adami Chazawi, menarik beberapa unsur-unsur tindak pidana yakni:³⁰

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

²⁸ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 227.

²⁹ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 80.

³⁰ Ibid. hlm. 81.